

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(LAZ)**

**Naskah Publikasi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Program Studi Muamalah  
(Syariah)**



**Oleh:**

**SARWANTO**

**I 000 100 006**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## **ABSTRAK**

Pada masa-masa belakangan ini, umat Islam di Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kesadarannya dalam beragama untuk menunaikan amalan-amalan dalam agama Islam yang bernilai ibadah di sisi Allah azza wa jalla. Dan terutama tentang masalah zakat, dimana terjadi perkembangan yang membahagiakan bagi pelaksanaan dan hasil dari penunaian amalan zakat ini oleh masyarakat Islam di negara ini. Salah satu indikasi yang dapat ditangkap ialah kita bisa melihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah ini. Serta dengan dibentuknya badan nasional oleh pemerintah Indonesia yang menangani secara operasional aspek teknis masalah zakat ini di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu muncullah sebagian dari masyarakat yang mendirikan organisasi ataupun lembaga kemasyarakatan Islam yang kegiatannya ialah mengelola (Pengumpulan dan penyaluran) zakat dari masyarakat Islam di Indonesia. Sehingga hal tadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat atau LAZ yang ada di Indonesia dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lembaga amil zakat (LAZ). Metode penelitian yang digunakan ialah bahwa penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan, kemudian bersifat kualitatif, lalu pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis serta pada penelitian kali ini pengumpulan datanya dengan cara yakni mencari bahan atau materi-materi yang digunakan untuk referensi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan amil zakat. Kemudian mencari materi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat serta materi dari lembaga amil zakat seperti dari Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), LAZIS Muhammadiyah dan LAZIS Nahdlatul Ulama. Analisis datanya yakni dengan cara memperbandingkan materi bab 3 (Tiga) tentang lembaga amil zakat (LAZ) dengan materi bab 2 (Dua) tentang amil zakat menurut hukum Islam dengan tolok ukurnya ialah materi dari bab 2 (Dua). Hasil analisa dan pembahasan penelitiannya ialah bahwa konsep lembaga amil zakat (LAZ) memiliki perbedaan dengan konsep amil zakat menurut hukum Islam. Konsep lembaga amil zakat (LAZ) ialah didirikan dan dikelola oleh sebagian masyarakat di Indonesia dan tidaklah diangkat dan ditunjuk secara langsung oleh pemimpin atau Imam umat Islam sebagaimana amil zakat menurut hukum Islam. Lembaga amil zakat (LAZ) memiliki program-program penyaluran zakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena mereka dalam penyaluran zakat tidak dalam satu komando atau perintah, Sebagaimana amil zakat menurut hukum Islam ialah dibawah satu komando atau perintah dari pemimpin atau Imam umat Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Amil Zakat.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. A. Yani Tromol Pos I. Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : SARWANTO  
NIM : I 000 100 006  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Muamalah (Syariah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat  
(LAZ)

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Panitia Ujian Munaqosyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2013 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada jurusan Muamalah (Syariah).

Surakarta, 22 Oktober 2013

Dekan

(Dr. MA. Fattah Santoso, M.A)

Ketua Sidang/Penguji I

(Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag)

Sekretaris Sidang/Penguji II

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag)

Penguji III

(Drs. Haruh, M.H.)

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini Pembimbing Skripsi:

Nama : Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag (Pembimbing I)

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah yang merupakan ringkasan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Sarwanto

NIM : I000100006

Program Studi : Syariah/Muamalah

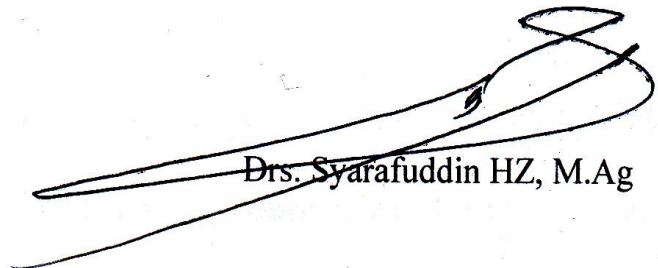
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 04 November 2013

Pembimbing I



Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag

## **PENDAHULUAN**

Dalam satu dekade atau lebih, pada tahun-tahun terakhir ini atau pada masa-masa akhir pemerintahan orde baru, terjadi peningkatan semangat masyarakat beragama Islam di Indonesia untuk beragama sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar. Salah satunya ditandai dengan merebaknya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dari harta-harta mereka. Indikasi yang bisa kita tangkap ialah melalui dibuatnya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999. Yang dimaksud zakat disini adalah zakat fitri dan zakat mal (Zakat harta benda yang produktif).

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara sejauh ini telah mengakomodasi masyarakatnya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam terutama mengenai zakat. Yaitu, dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang masalah zakat serta membentuk badan nasional yang melayani secara operasional aspek teknisnya.

Jauh-jauh hari sebelumnya, pemerintah Indonesia pada tahun 1999 sudah membuat peraturan perundang-undangan tentang masalah zakat, yaitu Undang-Undang Tahun 1999 No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah payung hukumnya ada, maka pada 2001 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ([www.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](http://www.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional) diakses pada tanggal 05 April 2013 pukul 14.46 WIB). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga amil zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Namun mulai tahun 2011 dengan sudah disahkannya Undang-Undang tentang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka digantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang lama dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang baru. “Substansi UU Pengelolaan Zakat yang baru, didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru ini sangat terkait dengan aspek teknis yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana” (<http://gagasanide.blogspot.com/2013/01/badan-amil-zakatinfak-dan-shodaqoh.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.23 WIB).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, oleh karena itu segala ketentuan yang datang dari sisi Rasulullah Muhammad SAW ialah syariat Islam dari Allah SWT, sehingga kebenarannya bersifat mutlak dan mengikat bagi seluruh umat Islam dimanapun di dunia ini dan dari waktu ke waktu sampai hari kiamat tiba.

Begitu juga dengan syariat zakat yang merupakan salah satu amalan penting dalam agama ini. Untuk itu pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan tentang amil (Petugas pemungut zakat) zakat menurut hukum Islam, yang akan diambilkan materinya dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Karena teori dan praktek dari syariat zakat serta termasuk di dalamnya amil zakat ada pada Sunnah Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin.

Zakat baru disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah (Al-Fauzan, 2001: 320). Namun dengan berbagai dinamika kehidupan politik Nabi SAW pada waktu itu, serta dengan adanya peperangan-peperangan yang terjadi, maka baru pada tahun ke-9 Hijriyah diutus petugas-petugas pengambil zakat (Amil zakat) (Al-Mubarakfuri, 2010: 501). Beberapa orang Sahabat RA yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai petugas zakat tadi dikirim ke kabilah-kabilah di berbagai daerah Islam. Beberapa Sahabat RA yang pernah menjadi petugas pengumpul zakat beserta pengutusan kabilahnya ialah sebagai berikut:

1. Uyainah bin Hisn ke Bani Tamim.
2. Yazid bin Al-Hushain ke Aslam dan Ghifar.
3. Abbad bin Bisyr ke Sulaim dan Muzainah.
4. Rafi' bin Mukaits ke Juhainah.
5. Amru bin Al-Ash ke Bani Farazah.
6. Adh-Dhahak bin Sufyan ke Bani Kilab.
7. Basyir bin Sufyan ke Bani Ka'b.
8. Ibnul Latibah Al-Uzdi ke Bani Dzubyan.
9. Al-Muhajir bin Abu Umayyah ke Shan'a.
10. Ziyad bin Lubaid ke Hadramaut.
11. Adi bin Hatim ke Tha'i dan Bani Asad.
12. Malik bin Nuwairah ke Bani Hanzhalah.
13. Az-Zibriqan bin Badr ke sebagian Bani Sa'd.
14. Qais bin Ashim ke sebagian Bani Sa'd yang lain.
15. Al-A'la bin Al-Hadrami ke Al-Bahrain.
16. Ali bin Abi Thalib ke Najran, untuk mengumpulkan sedekah dan sekaligus jizyah.

Para petugas ini yang dikirim pada bulan Muharram 9 Hijriyah. Sebagian diantara mereka ada yang dikirim setelah itu, karena kabilah-kabilah yang mereka datang juga masuk Islam di kemudian hari setelah itu. Yang pasti, permulaan pengiriman para petugas dan perhatian terhadap masalah ini terjadi pada bulan Muharram 9 Hijriyah (Al-Mubarakfuri, 2010: 501-502).

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq selama kurang lebih 27 bulan, kebijakan beliau RA mengenai amil zakat ialah melanjutkan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika pada saat penarikan zakat oleh amil zakat, terjadi penolakan penunaian zakat dari harta oleh sebagian umat muslim yang lemah imannya. Sehingga peristiwa tersebut membuat khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq murka yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang terkenal dalam sejarah Islam, yakni akan memerangi terhadap orang-orang yang “membedakan antara shalat dan zakat” (Katsir, 2004: 75-76).

Pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar RA sekitar 10 tahun (13 H-23 H/634 M-644 M), kebijakan yang berkaitan dengan petugas zakat yang diterapkan oleh khalifah Umar RA pada dasarnya hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh para pemimpin Islam pendahulunya (Rasulallah SAW dan khalifah Abu Bakr Ash-Shiddiq) (Al-Qasim, 2006: 507). Dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Beliau RA menyuruh para amil zakatnya untuk mengulang-ulang pemberian terhadap golongan fakir dan miskin. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 (Al-Haritsi, 2003: 255 dan 293).

Ada suatu kebijakan baru dari khalifah Utsman RA mengenai pengambilan zakat, bahwa Beliau RA menerapkan kebijakan, yakni memberikan kewenangan kepada para pemilik harta untuk menaksir besaran zakat terhadap harta yang dimilikinya. Hal ini disebabkan ada sebagian oknum pengumpul zakat yang kurang amanah dalam menjalankan tugasnya (Abdullah, 2011: 104).



Sekali lagi pada dasarnya setiap masa dari pemerintahan awal umat Islam (Masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin), mempunyai kebijakan terkait petugas zakat adalah sama. Perbedaan mungkin hanya terjadi pada tingkatan teknis operasional dari amil zakat, karena memang umat Islam dari waktu ke waktu semakin bertambah. Untuk masa khalifah Ali RA maka kebijakan baru tersebut terlihat pada masalah objek zakat. Dimana dengan bertambah luasnya wilayah yang dikuasai umat Islam maka sejalan dengan itu pula ditemukan beberapa objek zakat yang baru. Dan tentu saja penetapannya sebagai objek zakat yang baru harus berdasarkan pada kebijakan khalifah yang sedang memimpin dengan persetujuan para Sahabat RA yang paham terhadap syariat Islam (Abdullah, 2011: 109).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian, diharuskan berpikir dan bersikap ilmiah bagi setiap peneliti. Dan salah satu karakteristik keilmiahan adalah selalu menggunakan metodologi dalam setiap penelitian. Karena metodologi adalah “Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan” (Nurboko, 1997: 1).

Adapun metode yang dipakai pada penelitian kali ini ialah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian kali ini, digunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada penggalan sumber-sumber tertulis (Studi kepustakaan).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian kali ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong dalam Haris Hardiansyah, 2012: 9).

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang berbasis hukum atau secara hukum, dan yang dimaksud hukum dalam penelitian kali ini ialah hukum Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian studi kepustakaan, pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis merupakan inti dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian kali ini pengumpulan datanya dengan cara, yaitu pertama-tama mencari bahan atau materi-materi yang digunakan untuk referensi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan amil zakat dan seluk beluknya. Kemudian mencari materi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat serta untuk mengambil data dari lembaga amil zakat maka akan diambil contoh atau sampel lembaga amil zakat yang sudah populer di masyarakat secara umum dan sudah relatif mapan beroperasi di Indonesia. Diantara lembaga amil zakat tersebut ialah Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), LAZIS

Muhammadiyah dan LAZIS Nahdlatul Ulama. Yang pada penelitian kali ini diambil materinya yang berasal dari situs-situs internet resmi milik mereka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

## 5. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam suatu penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai dalam suatu penelitian. Beberapa diantara yang dijadikan referensi utama adalah *Shahih Bukhari* karya Imam Al-Bukhari, *Shahih Muslim* karya Imam Muslim, *Sunan Abi Daud* karya Imam Abu Daud, *Sunan Tirmidzi* karya Imam At-Tirmidzi, *Sunan Ibnu Majah* karya Imam Ibnu Majah, *Musnad Ahmad* karya Imam Ahmad bin Hambal, *Al-Muwattha* karya Imam Malik bin Anas, *Ensiklopedia Keuangan Publik (Al-Amwal)* karya Abu Ubaid Al-Qosim bin Sallam dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam)* karya Imam Al-Mawardi serta masih ada beberapa bahan bacaan lain yang digunakan dalam penelitian kali ini. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat serta situs-situs resmi dari beberapa contoh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Situs-situs tersebut seperti: [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org), [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id), [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org), [www.lazismu.org](http://www.lazismu.org) dan [www.lazisnu.or.id](http://www.lazisnu.or.id).

## b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data pelengkap dan bukan merupakan data primer atau utama pada suatu penelitian. Data sekunder dalam penelitian kali ini ialah tulisan-tulisan atau informasi-informasi di situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat dipercaya, diantaranya ialah [www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net) dan [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) serta masih ada beberapa yang lain.

## 6. Analisis Data

Analisis data ialah proses pengolahan atau penguraian data dari data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam perspektif ilmiah yang sama (Herdiansyah, 2012: 158). Pada penelitian kali ini analisis data dilakukan dengan cara, yaitu pertama-tama, data-data yang berbentuk informasi dan sudah terkumpul diklasifikasikan dalam bab-bab dan sub bab, kemudian dari pembahasan pada bab 3 (Tiga) diambil kesimpulan. Langkah selanjutnya ialah kesimpulan dari bab 3 (Tiga) tadi diperbandingkan dengan data dari bab 2 (Dua) dengan basis atau tolok ukur dari data pada bab 2 (Dua). Teknisnya ialah jika kesimpulan dari bab 3 (Tiga) tadi berbeda atau berselisih dengan data dari bab 2 (Dua) maka dipastikan bahwa ada yang menyalahi hukum Islam dalam hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kesimpulan dari bab 3 (Tiga) tadi selaras dengan data dari bab 2 (Dua) maka tidak ada yang menyelisihi hukum Islam.

## **HASIL PENELITIAN**

Setiap LAZ yang ada di Indonesia dengan melihat pada keterangan pada bab 3 (Tiga) mengenai regulasi zakat terhadap LAZ dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka kita bisa melihat bahwa setiap LAZ yang ada di Indonesia wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut serta pada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap LAZ supaya mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Sehingga kita bisa menangkap pengertian bahwa di Indonesia peran dan kewenangan pemerintah Indonesia sebagai penguasa kepentingan umat Islam di negara ini terkait masalah pengelolaan zakat khususnya mengenai LAZ juga kentara terasa dengan bukti dibuatnya regulasi atau peraturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia ini bahkan sudah pada level diundangkan dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap LAZ yang ada di negara Indonesia termasuk yang sudah eksis berdiri dan sudah professional sebagaimana yang dijadikan sampel pada penelitian kali ini seperti Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Lazis Muhammadiyah dan Lazis Nahdlatul Ulama, sampai yang hanya pada tingkat instansi ataupun yang baru berdiri kemarin, otomatis mempunyai izin dan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan yang mewakili dalam masalah amil atau pengelolaan (Pengumpulan dan pendistribusian) zakat.

Setiap LAZ yang sudah terbentuk yang ada di negara Indonesia seluruhnya juga otomatis mendapat rekomendasi dari BAZNAS yang merupakan badan nasional yang mengurus masalah zakat secara menyeluruh dan menasional,

seperti tertulis jelas pada bab 3 (Tiga) pasal 18 poin b nomor 3. Setiap LAZ yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang tersebut juga sejatinya ialah pembantu BAZNAS dalam hal pengelolaan (Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) zakat umat Islam di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada bab 3 (Tiga) pasal 17.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Bahwa ditinjau dari ajaran hukum Islam mengenai amil zakat antara LAZ dan amil atau petugas zakat menurut hukum Islam, yakni mereka sama-sama mengantongi legalitas dari penguasa kepentingan umat Islam atau Imam atau presiden dalam hal eksistensinya atau keberadaannya.

Setiap LAZ yang ada di Indonesia dan amil atau petugas zakat menurut hukum Islam memiliki persamaan dalam hal legalisasi pelaksanaan pengelolaan (Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) zakat dari umat Islam.

Diharapkan setiap LAZ yang ada di Indonesia supaya tetap konsisten terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan berlangsung, karena peraturan-peraturan yang ada dan mengatur tentang LAZ di Indonesia ini pada sekarang ini sudah dapat dikatakan mencukupi terhadap apa-apa yang menjadi tuntutan oleh hukum Islam dalam masalah amil atau petugas zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi. 2011. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Administrator. Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh. <http://gagasanide.blogspot.com/2013/01/badan-amil-zakatinfak-dan-shodaqoh.html>. (Diakses tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.23 WIB).

- Administrator. Badan Amil Zakat Nasional. [www.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](http://www.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional). (Diakses pada tanggal 05 April 2013 pukul 14.46 WIB).
- Administrator. Dana Umat Potensi Besar yang Belum Tergali dengan Baik. <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/01/30/dana-umat-potensi-besar-yang-belum-tergali-dengan-baik>. (Diakses tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.12 WIB).
- Administrator. Potensi Zakat Umat Muslim Indonesia Belum Dimaksimalkan. [www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmz20-potensi-zakat-umat-muslim-indonesia-belum-dimaksimalkan](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmz20-potensi-zakat-umat-muslim-indonesia-belum-dimaksimalkan). (Diakses tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.34 WIB).
- Administrator. Mengenal Rumah Zakat Indonesia. <http://rumahzakat.org/mengenal-rumah-zakat-indonesia.pdf>. (Diakses tanggal 25 Mei 2013 pukul 21.32 WIB).
- Administrator. [www.dompethuafa.org](http://www.dompethuafa.org). (Diakses tanggal 02 Juni 2013 pukul 11.04 WIB).
- Administrator. [www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net) (Diakses tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.48 WIB).
- Administrator. [www.lazismu.org](http://www.lazismu.org). (Diakses tanggal 02 Juni 2013 pukul 10.16 WIB).
- Administrator. [www.lazisnu.or.id](http://www.lazisnu.or.id). (Diakses tanggal 02 Juni 2013 pukul 11.34 WIB).
- Administrator. [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id). (Diakses tanggal 02 Juni 2013 pukul 10.21 WIB).
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2003. *Taudihul Ahkam min Bulughil Maram (Ebook)*. Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Asadi.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. 2001. *Al-Mulakhos Al-Fiqhiy (Juz ke-1)*. Riyadh: Darul Ashimah.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2003. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatthab (Terj.)*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Mawardi. 2012. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam)(Terj.)*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. 2010. *Sirah Nabawiyah (Terj.)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Al-Quran Al-Karim. 2003. *Quran in Word (Software)*.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2008. *Pelajaran Mengenai Puasa, Tarawih dan Zakat (Ebook) (Terj.)*. Maktabah Raudhah Al-Muhibbin <http://www.raudhatulmuhibbin.org>. (Diakses tanggal 21 Mei 2013 pukul 17.10 WIB).
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jami At-Tirmidzi (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Bin Anas, Malik. *Muwattha Imam Malik (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Bin Sallam, Abu Ubaid Al-Qosim. 2006. *Ensiklopedia Keuangan Publik (Terj.)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bin Al-Asy'ats, Sulaiman. *Sunan Abu Daud (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Bin Al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Imam Ahmad (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Bin Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah (Software kitab 9 Hadits)*. Lidwa Pusaka.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk ilmu-ilmu sosial)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khulafaurrasyidin (Ebook) (Terj.)*. Jakarta: Darul Haq.
- Manzhur, Ibnu. 1955. *Lisanul Arab (Ebook)*. Kairo: Darul Maarif.
- Narbuko, Cholid. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia (Ebook)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yuwono, Trisno dan Pius Abdullah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Arkola.